

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Penolakan terhadap keberadaan krematorium yang dikelola oleh Himpunan Bersatu Teguh terjadi karena lokasi keberadaan krematorium berada ditengah tempat yang padat penduduk dan berdekatan dengan tempat ibadah yang dalam hal ini ialah Masjid Muhammadan. Hal tersebutlah yang kemudian membuat masyarakat yang diperkuat dengan terbentuknya Aliansi Masyarakat Minang melakukan serangkaian aksi penolakan secara terus menerus.

Penolakan terhadap keberadaan krematorium tersebut berlangsung dari tahun 2015 hingga tahun 2017. Akhir dari segala jenis penolakan yang terus dilakukan oleh Aliansi Masyarakat Minang tersebut ialah berakhir dengan dipindahkannya alat krematorium tersebut kelokasi yang jauh dari lokasi padat penduduk. Pemindahan tersebut terjadi sebagai pelaksanaan kesepakatan berbagai pihak yang dipertegas melalui himbauan yang dikeluarkan oleh Walikota Kota Padang.

Sebagai sarana dalam penyampaian aspirasi, Aliansi Masyarakat Sumbar sangat konsisten melalui cara demonstrasi. Demonstrasi merupakan salah satu dari empat saluran penyampaian aspirasi sesuai dengan konsep yang dikemukakan oleh Asrinaldi melalui buku Kekuatan Politik Indonesia. Bahwa demonstrasi, melalui hubungan pribadi, perwakilan langsung, ataupun melalui saluran formal dan institusi lain merupakan bagian dari saluran penyampaian aspirasi.

Kemudian, jika dikelompokkan lebih mendalam terkait jenis kelompok kepentingan yang dalam hal ini ialah Aliansi Masyarakat Minang, maka kelompok kepentingan ini termasuk kedalam jenis Kelompok kepentingan non-associasional. Artinya, kelompok ini jarang terorganisir dengan rapi dan kegiatannya bersifat kadangkala. Sebagai ciri utamanya ialah, dalam menyampaikan aspirasinya, mereka sering menggunakan pemimpin agama.

B. Saran.

1. Secara Akademis

Penelitian ini masih jauh dari kata sempurna. Hal ini dikarenakan fokus penelitian yang hanya mencakup kelompok kepentingan terhadap penolakan krematorium, dan adanya hubungan yang dirasa memiliki sasaran yang tidak tepat. Sasaran yang tidak sejalan tersebut ditunjukkan oleh adanya penyampaian aspirasi yang hanya menggunakan saluran aspirasi dalam bentuk demonstrasi. Untuk itu, penelitian ini perlu dibahas lebih lanjut dan mendalam mengenai bagaimana perkembangan kelompok kepentingan terkait penolakan Aliansi Masyarakat Minang terhadap keberadaan krematorium Himpunan Bersatu Teguh kota Padang.

2. Secara Praktis

Untuk Pemerintah Daerah

Walaupun pemerintah daerah berperan aktif dalam menanggapi aksi penolakan Aliansi Masyarakat Minang tetapi masih mempunyai kekurangan, yakni pemerintah baru menanggapi isu penolakan dari masyarakat ketika penolakan telah menjadi bentuk aksi demonstrasi. Selain itu, terkait perizinan



krematorium, hal yang menjadi masukan ialah harus adanya transparansi dan sosialisasi kepada masyarakat. Sehingga, apabila telah terbit suatu izin pengelolaan yang berhubungan dengan kegiatan atau fasilitas keagamaan tidak menjadi keresahan bagi masyarakat lainnya yang memiliki keyakinan yang berbeda.

Untuk Masyarakat

Bagaimanapun juga pengelolaan krematorium ini merupakan kebutuhan salah satu masyarakat Kota Padang, yakni masyarakat Tionghoa. Hendaknya, harus ada sikap saling toleransi antar keyakinan terhadap pelaksanaan upacara ataupun fasilitas keagamaan dari yang berbeda keyakinan.

